

Forum Human Capital
Kementerian Kelautan dan Perikanan

INTEGRITAS ASN: KUNCI SUKSES HUMAN CAPITAL DAN PROGRAM PRIORITAS KKP

JAKARTA, 02 JUNI 2025

...



Setyo Budiyanto
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

MEMBANGUN SDM BERINTEGRITAS

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

dengan dasar 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi



Pembangunan Manusia
serta Penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi



Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan



Pemerataan
Pembangunan

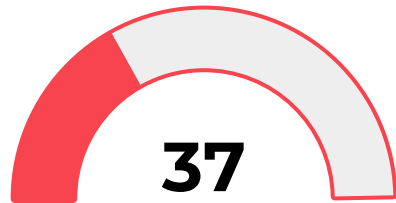


Pemantapan
Ketahanan Nasional
dan Tata Kelola
Kepemerintahan

Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika pilar-pilar ini dijalankan dengan integritas dan kepemimpinan yang kuat.

REALITA KINI: **ANCAMAN KORUPSI** **YANG MENGHAMBAT VISI 2045**

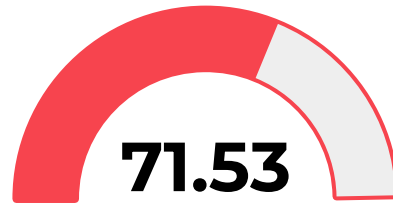
Berbagai indikator menunjukkan bahwa integritas nasional masih **RENTAN** dan korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan.



37
dari 100

Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) 2024

Skor rendah, persepsi
korupsi masih tinggi



71.53
dari 100

Indeks Integritas
Nasional 2024

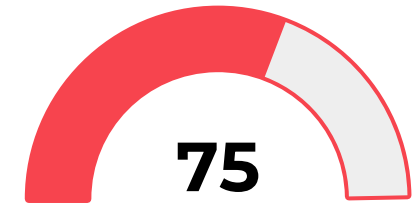
Integritas instansi
belum kuat



3.85
dari 5.00

Indeks Perilaku
Antikorupsi (IPAK) 2024

Perilaku antikorupsi
masyarakat belum konsisten



75
dari 100

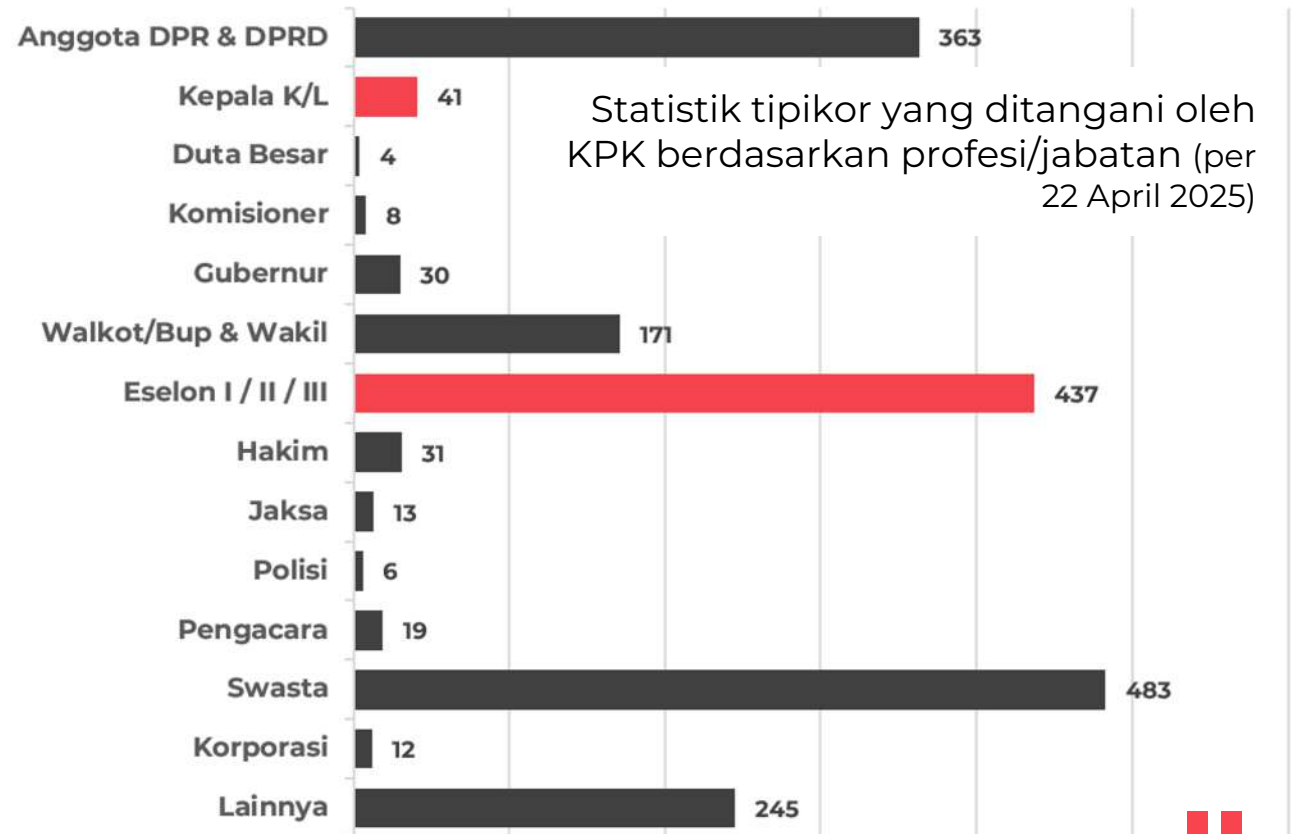
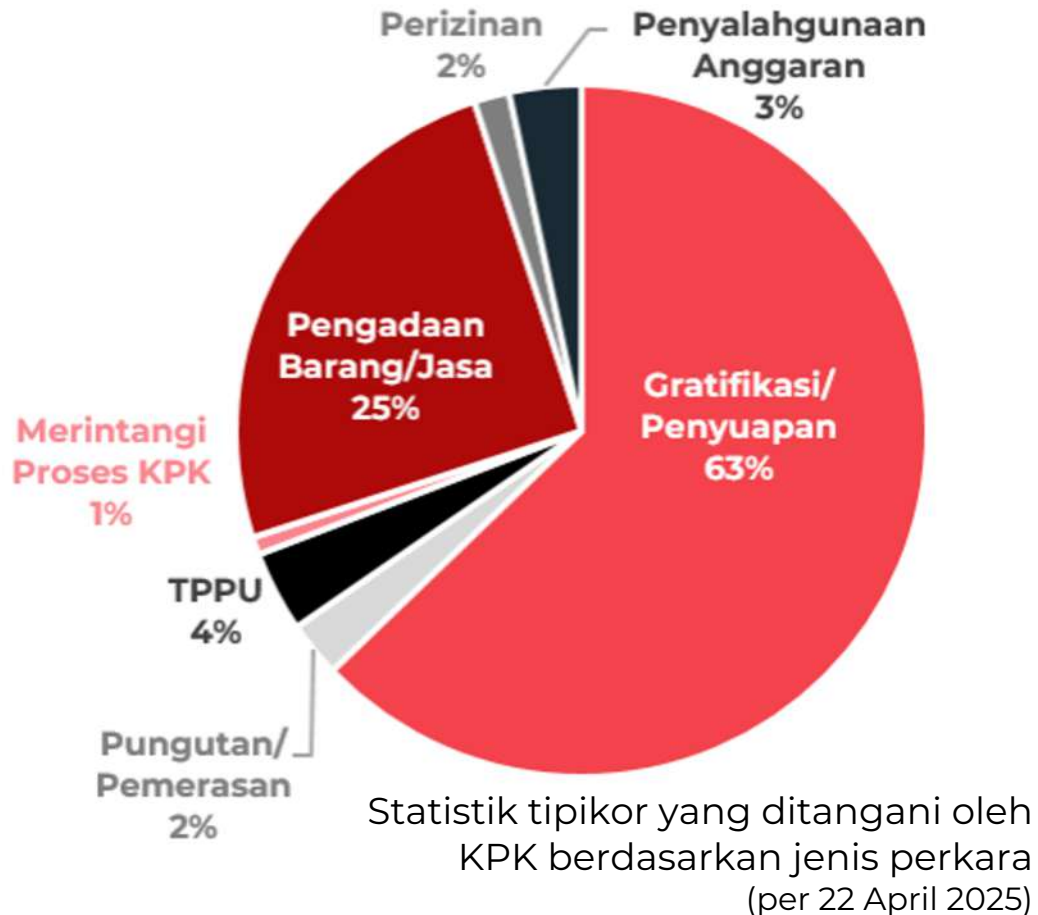
Capaian Monitoring Center
for Prevention (MCP)
Nasional 2024

Aksi pencegahan pemda belum
optimal di 7 area intervensi

• • • Data ini menunjukkan masih adanya kerentanan sistemik

FAKTA KERENTANAN INTEGRITAS DAN SUMBER MASALAH

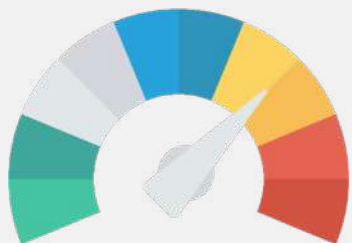
Tantangan integritas di birokrasi terlihat dari dominasi ASN dalam kasus korupsi, dengan penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dan pengaturan jabatan sebagai masalah utama



Survei Penilaian Integritas

Merupakan survei untuk mengukur tingkat/risiko korupsi di suatu KLPD ditujukan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi

Dimensi pengukuran



- Transparansi
- Integritas Tugas
- Pengelolaan PBJ
- Pengelolaan SDM
- *Trading in influence*
- Pengelolaan Anggaran
- Sosialisasi Antikorupsi

Penilai: Kombinasi survei online dan tatap muka (CAPI)



INTERNAL
Pegawai di Instansi



EKSTERNAL
Penerima Layanan, Mitra, Vendor, dll



EKSPER
Auditor, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dll.

Indeks Integritas Nasional 2024 **71.53** Kategori: **rentan**



TERENDAH Kab. Seram Bagian Timur: **52.93**
TERTINGGI Bank Indonesia (BI): **86.71**



Kementerian Kelautan dan Perikanan
79.19 **80.31**



Kementerian Pertanian
66.79 **74.46**



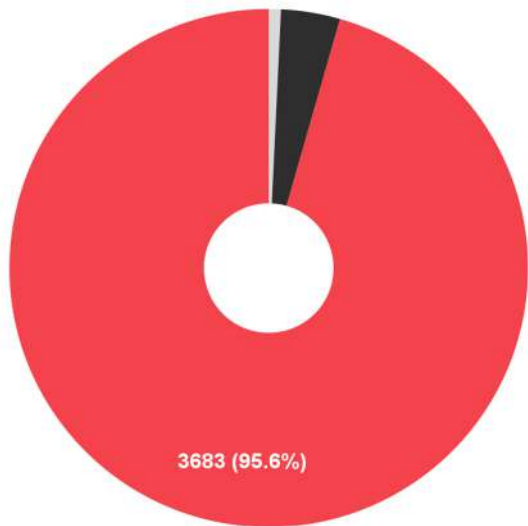
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
76.19 **80.33**

843,017 responden: 94 K/L, 37 Pemprov, 508 Pemkab/Pemkot, 2 BUMN



TEMUAN SPI 2024

KKP



● Ekspers ● Eksternal ● Internal
0.8% 3.7% 95.5%

% Responden (n=4,124)



TINGKAT KEYAKINAN RISIKO KEJADIAN SUAP & GRATIFIKASI

42%

Pengalaman responden menilai / melihat gratifikasi / suap di instansi, semakin rendah semakin baik



14% PERSEPSI KEBERADAAN TRADING IN INFLUENCE

Penilaian adanya perdagangan pengaruh di instansi



RISIKO PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS

37%

Responden Internal melihat / mendengar **penyalahgunaan anggaran perjalanan** dinas terjadi.

23%

Responden Internal melihat / mendengar **penyalahgunaan SPJ** untuk honor, biaya transport lokal, dll

RISIKO PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PBJ



56%

Nepotisme

5%

Gratifikasi

45%

Pemenang vendor sudah diatur

53%

Kualitas barang & jasa rendah

39%

Hasil PBJ tidak bermanfaat



RISIKO KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SDM

Nepotisme dan jual beli jabatan

18%

Hubungan kekerabatan

21%

Kedekatan dengan pejabat

18%

Kesamaan almamater



RISIKO PENYALAHGUNAAN FASILITAS KANTOR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

73%

Responden menilai pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll)



PEMBERIAN UANG, BARANG, DAN FASILITAS DALAM MUTASI DAN PROMOSI

12%

Responden internal mengakui masih terdapat jual beli jabatan di instansinya

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN ASN BERINTEGRITAS

Komitmen Nyata vs Seremonial Belaka

- **Komitmen Pimpinan Belum Merata:** Ketidakterrataan komitmen pimpinan menyebabkan kesenjangan dalam penerapan integritas di berbagai level.
- **Program Integritas Hanya Formalitas:** Banyak program integritas yang terbatas pada seremoni dan dokumen tanpa implementasi konkret.
- **Kampanye Integritas Terbatas dan Tidak Masif:** Kampanye integritas belum menjangkau seluruh ASN dan sering kali dilaksanakan hanya sesekali.



MENGAPA INTEGRITAS **PENTING?**

Integritas adalah kunci dalam menciptakan birokrasi bersih dan mengelola sektor kelautan yang berkelanjutan



- **Integritas adalah pondasi untuk membangun birokrasi yang bersih,** dengan mengintegrasikan nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap sistem pelayanan publik.
- **Sektor kelautan dan perikanan memiliki risiko korupsi yang tinggi,** mengingat tantangan dalam mengelola sumber daya laut yang rentan terhadap penyalahgunaan.
- **Peran ASN KKP sangat krusial,** karena mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya laut yang harus dijaga secara berkelanjutan dan adil.

TANTANGAN INTEGRITAS: TETAP TEGAK DI TENGAH TEKANAN

Relasi antara Jabatan dan Karier dengan penyalahgunaan kekuasaan.

- Pejabat jujur sering dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan.
- Namun, merekalah benteng terakhir yang menjaga birokrasi tetap bersih.
- Keberanian adalah syarat utama untuk bertahan dalam integritas.

“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas.”



PAKU INTEGRITAS

KKP 2021

- PAKU Integritas: Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang diikuti oleh Menteri KPK dan jajaran Pejabat Eselon I beserta pasangan
- Meningkatkan kesadaran integritas, komitmen antikorupsi dan kapasitas mitigasi risiko korupsi di KKP
- KPK berperan dalam mendukung K/L lain untuk menciptakan budaya antikorupsi melalui program berbasis pada pengembangan human capital



MEMPERKUAT INTEGRITAS DI KKP: REKOMENDASI DAN AKSI

Pentingnya peran pimpinan dan ASN sebagai duta integritas dalam membangun budaya kerja yang bersih dan transparan di KKP



LIBATKAN PIMPINAN SECARA AKTIF

Pimpinan KKP harus menjadi contoh dalam mendukung dan menjalankan program integritas.



INTEGRASIKAN NILAI INTEGRITAS DALAM MANAJEMEN SDM

Nilai integritas harus diintegrasikan dalam setiap tahapan manajemen SDM, dari rekrutmen hingga penghargaan.



JADIKAN ASN KKP DUTA INTEGRITAS

ASN KKP harus menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

"Laut kita luas, tapi
masa depan **INDONESIA**
lebih luas jika dijaga oleh
ASN yang berani jujur
dan berintegritas."

Setyo Budiyanto, 2 Juni 2025



TERIMA KASIH

Forum Human Capital
Kementerian Kelautan dan Perikanan



UNDUH DISINI

**Booklet Stranas PK
Tahun 2025-2026**

<https://bit.ly/BookletStranasPK2025-2026>

